

DAFTAR BACAAN

BUKU

Hadjon, Philipus M. et.all., Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.

_____, 'Tentang Wewenang', Yuridika, Vol 7, No. 5-6, 1997, h. Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Santoso, Urip, Hukum Penataan Ruang, Airlangga University Press, Surabaya, 2012.

Erwin, Hukum Lingkungan, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Wiyono, R., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat., Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik, Nuansa Cendekia, Bandung, 2019.

Sri Djatmiati, Tatiek et.all., Buku Ajar Hukum Perizinan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.

Mertokusumo, Sudikno., Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Kementerian Hukum dan HAM, Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama, Jakarta, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385).

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267).

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647).

Keputusan Gubernur Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT. Jakarta Propertindo.

Keputusan Gubernur Nomor 2637 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H Kepada PT. Taman Harapan Indah.

Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT. Jaladri Kertika Pakci.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

JURNAL

Bintari, Antik dan Talolo Muara, 'Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta', Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol 4, No 1, 2018.

Herman dan Hendry Julian Noor, 'Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)', Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 3, No 1, 2017.

Hadi, Sofyan dan Tomy Michael, 'Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara', Jurnal Cita Hukum, Vol 5, No 2, 2017, h. 386.

Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, 'Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara', Arena Hukum, Vol 11, No 1, 2018.

INTERNET

Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Reklamasi Teluk Jakarta,
<https://metro.tempo.co/read/1130345/anies-baswedan-resmi-cabut-izin-reklamasi-teluk-jakarta/full&view=ok>, 26 September 2018, dikunjungi pada 14 Oktober 2019.

<http://repository.uin-suska.ac.id/7052/4/BAB%203.pdf>, dikunjungi pada 18 November 2019.